

Daftar Isi

Struktur Kepengurusan Jurnal	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	v
1. STRATEGI POSITIONING POLITIK DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASIONAL DEMOKRAT PADA PEMILU 2014 DI KOTA AMBON Johan Tehuayo	1-20
2. IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI PROVINSI MALUKU Joana J. Tuhumury	21-30
3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI 2 AMBON Said Lestaluhu	31-55
4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KETAHANAN PANGAN LOKAL DI PROVINSI MALUKU Muhammad Taher Karepesina & Amir Faisal Kotarumalos	56-66
5. ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM TIMUR Sitti Nurjana Batjo	67-72
6. IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KANTOR PEMBANTU REKTOR IV UT TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN DANA SOSIALISASI DAN PROMOSI DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI MAHASISWA DI UPBJJ UT AMBON Muhammad Taher Karepesina	73-90
7. AKULTURASI PERILAKU KOMUNIKASI ANTAR ETNIS JAWA DAN ETNIS SERAM DI KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Selvianus Salakay	91-99
8. INVENTARIS BUDAYA MASYARAKAT ADAT (STUDI MASYARAKAT NEGERI SOYA) Prapti Murwani	100-115
9. KONFLIK PORTO HARIA DI KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH (SUATU TINJAUAN PERSPEKTIF DALAM SOSIOLOGI) Sarmalina Rieuwpassa	116-134
10. PENGARUH REPUTASI DAN EKUITAS MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (STUDI PADA PRODUK HIGHT DAN LOW INVOLVEMENT) Amir Rumra	135-149

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KANTOR PEMBANTU REKTOR IV UT
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN DANA SOSIALISASI DAN PROMOSI
DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI MAHASISWA DI UPBJJ
UT AMBON

M. TAHIR KAREPESINA¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV UT Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis Implementasi Kebijakan tersebut dilihat dari Variabel 1) Implementasi Kebijakan yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, Struktur birokrasi. 2) Variabel Sosialisasi dan Promosi yang meliputi Manajemen dan penyelenggaraan, Efektifitas pelaksanaan, Prosedur pelaksanaan, Rincian biaya yang digunakan, Waktu pelaksanaan, dan 3) Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa yang meliputi Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang (Mata Kuliah). Penelitian ini melibatkan responden Mahasiswa Non Pendas dan unsure Pimpinan yang terdiri dari Kepala UPBJJ UT Ambon, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Badan pengelola Pendidikan UT di Namlea, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif.. Setelah dilakukan analisis, data menunjukkan bahwa Impelementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Sosialisasi dan Promosi, Angka Partisipasi Mahasiswa

A. Pendahuluan

Tujuan nasional indonesia hanya dapat dicapai melalui rangkaian pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa itu maka dibutuhkan tekad dan kerja keras yang sistematis, terencana dan berkesinambungan dalam pemanfaatan berbagai potensi nasional dimiliki. Oleh karena pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional yang kurang terkonsep, tidak terencana dengan baik dan kurang terkendali itulah kemudian melahirkan suatu situasi pembangunan yang kacau dan membingungkan sehingga butuh skala prioritas dalam pembenahannya. Dalam kondisi yang mendesak dan segera inilah maka dibutuhkan Kebijakan publik sebagai solusinya. Timbulnya kebijakan disebabkan oleh adanya gejala yang muncul atas rasa keadilan yang dialami oleh masyarakat kita. Jadi

¹ Dosen FISIP Universitas Terbuka, Ambon

hadirnya kebijakan tidak hanya bertumpu pada keadaan-keadaan dalam organisasi saja yang bersifat *entropi* akan tetapi lebih dinamis oleh karena bersumber dari kehidupan masyarakat sebagai sasaran dari cita-cita bernegara itu.

Kebijakan publik disatu pihak lebih menekankan pada keinginan rakyat banyak yang hidup dalam masyarakat luas suatu negara, dan tidak hanya berdasarkan pada kemauan elit yang berkuasa. Sedangkan dipihak lain bentuk organisasi tidak menekankan pada mekanisme sistem entropi dan memerlukan proses pengembangan dan pembinaan organisasi yang terus menerus. (Silalahi, 1999 : 148).

Sementara para ahli berpendapat bahwa hal yang paling esensial dalam kebijakan publik adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah diputuskan kebijakan tersebut tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. (Wahab, 2002 : 127).

Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu upaya nyata dalam bentuk pelaksanaan kebijakan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik.

Menurut Robert Nakamura dan Diane MP, (1974 : 123) hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut. Atau, kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Salah satu defenisi esensial tentang kebijakan pemerintah diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Winarno 2002 : 15) bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan public diberikan Thomas R. Dye (2002 : 16) yang mengatakan bahwa "kebijakan pemerintah adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan pemerintah.

Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Winarno 2002 : 15) Ia mengatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah

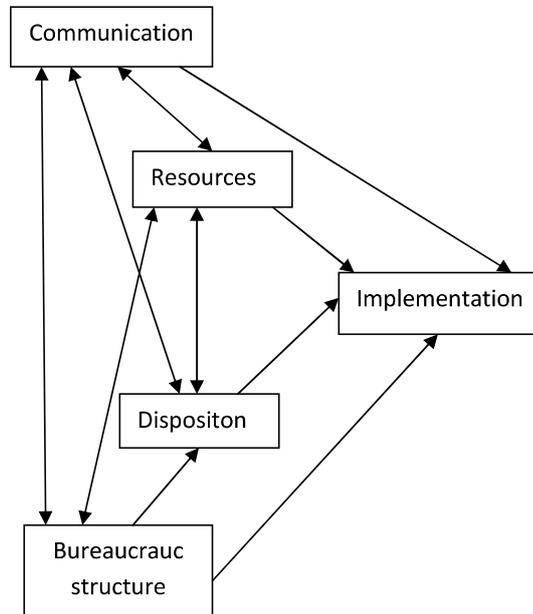
dengan lingkungannya. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan Thomas R. Dye (2002 : 16) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik.

Friedrich (2007 : 3) mengartikan kebijakan publik sebagai "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Defenisi yang diberikan oleh Friedrich ini pada dasarnya mempunyai dimensi yang luas. Kebijakan publik dalam hubungan ini harus dipahami bukan saja sebagai tindakan oleh pemerintah tetapi juga oleh perseorangan atau sekelompok orang. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari peluang-peluang karena adanya hambatan-hambatan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas maka model atau pendekatan untuk menganalisis implementasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ([http://www.google.com/implementing public policy](http://www.google.com/implementing_public_policy)). Ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara mem*breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan George Edward III



Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementator mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkan. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah

melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu

dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); 4) Vitalitas suatu organisasi; 5) Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Universitas Terbuka sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan tinggi tentu punya berbagai kebijakan tentang operasional institusi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Terbuka, maka Kantor Pembantu Rektor IV merumuskan sebuah kebijakan dalam rangka memberikan tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi.

Dana tersebut, selanjutnya didistribusikan kepada unit-unit program belajar jarak jauh yang ada di lingkungan Universitas Terbuka. Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Ambon sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Universitas Terbuka juga menerima dana bantuan tersebut. Sebanyak 75.000.000.- digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan promosi dalam wilayah UPBJJ UT Ambon.

Dalam kenyataannya realisasi penggunaan dana tersebut di UPBJJ UT Ambon terdapat banyak kendala. Kendala-kendala tersebut terlihat dari perencanaan yang kurang matang. Hal ini terlihat dari penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan promosi, namun juga digunakan untuk kegiatan lain. (hasil wawancara dengan Kasubag TU UPBJJ UT Ambon). Alokasi penggunaan dana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 1: Alokasi Penggunaan Dana Sosprom 2013

No	Jenis Kegiatan	Alokasi Dana	Keterangan
1	Sosialisasi melalui RRI Ambon	34.000.000	Sesuai

2	Sosialisasi melalui spanduk	4.500.000	Sesuai
3	Kegiatan lain diluar sosialisasi dan promosi	36.500.000	Tidak sesuai

Sumber: Bendahara Pembantu Pengeluaran UPBJJ UT Ambon

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 36.500.000.- atau 48,67% penggunaan dana sosialisasi dan promosi tidak tepat sasaran bahkan salah prosedur, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap tujuan utama sosialisasi dan promosi yakni mengenalkan Universitas Terbuka kepada masyarakat luas.

Hasil dari sosialisasi dan promosi tersebut selain mengenalkan Universitas Terbuka, tentunya juga dapat meningkatkan angka partisipasi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka. Angka partisipasi tersebut antara lain adalah mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah (registrasi ulang) dan registrasi mahasiswa baru. Uraian mahasiswa yang melaksanakan registrasi mata kuliah dan registrasi mahasiswa baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Keadaan Mahasiswa pada UPBJJ UT Ambon periode 2013.2 - 2014.1

No	Lokasi Belajar	Jumlah Mahasiswa						Ket
		2013.2			2014.1			
		Reg Mata Kuliah	Baru	Jumlah	Reg Mata Kuliah	Baru	Jumlah	
1	Ambon	235	69	304	225	21	246	Turun
2	Piru	178	17	195	181	23	204	Naik
3	Bula	3	0	3	14	25	39	Naik
4	Masohi	69	1	70	89	28	117	Naik
5	Namlea	50	8	58	50	3	53	Turun
6	Tual	105	8	113	68	7	75	Turun
7	Saumlaki	51	14	65	48	10	58	Turun
8	Dobo	126	8	124	132	11	143	Naik
9	Kisar	93	7	100	79	13	92	Turun
	Jumlah	910	132	1042	886	141	1027	Turun

Sumber: Data registrasi dan ujian

Data tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi mahasiswa baru pada periode 2014.1 bila dibandingkan periode 2013.2. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan registrasi ulang mata kuliah pada periode 2014.1 bila dibandingkan dengan periode 2013.2. sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan angka partisipasi

mahasiswa yang melakukan registrasi ulang mata kuliah maupun registrasi mahasiswa baru pada periode 2014.1 bila dibandingkan dengan periode 2013.2

Berangkat dari pengertian-pengertian, Paparan data dan kesenjangan yang ada di UPBJJ UT Ambon tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian atas masalah tersebut dengan tema " Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV Universitas Terbuka Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di Unit Program belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT) Ambon.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : **"Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV Universitas Terbuka Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di Unit Program belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT) Ambon.?"** Karena ruang lingkup kebijakan begitu luas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada bagaimana UPBJJ UT Ambon Mengimplementasikan Penggunaan Dana Bantuan Sosialisasi dan Promosi yang diberikan oleh Kantor Pembantu Rektor IV Tahun 2013. Mengingat wilayah kerja UPBJJ UT Ambon yang begitu luas dan terdiri dari pulau-pulau, maka subjek penelitian ini dibatasi pada mahasiswa UT Program Non Pendas yang ada di Namlea Kabupaten Buru.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui secara mendalam tentang sejauhmana Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Sosialisasi dan Promosi yang diberikan oleh Kantor Pembantu Rektor IV selama 2013 di UPBJ JT Ambon. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. UPBJJ UT Ambon khususnya dan Universitas Terbuka dalam mengevaluasi pemberian dana bantuan sosialisasi dan promosi.
- b. Ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khasanah Ilmu Administrasi

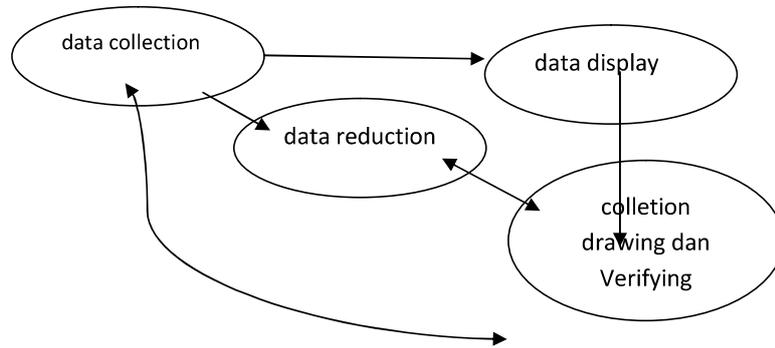
Data Penelitian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek kajian dengan mengadakan interaksi (wawancara) dengan para informan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data Sekunder yaitu 1) daftar penggunaan dana dan personil yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan Promosi melalui Radio Republik Indonesia wilayah Maluku dan Maluku Utara, 2) data jumlah spanduk yang dikirim ke lokasi Kelompok Belajar Non Pendas di Daerah-Daerah dan 3) data tentang penggunaan dana sosialisasi dan promosi untuk kegiatan diluar sosialisasi dan promosi. Data Primer yang diperoleh dari Informan dengan menggunakan a) Wawancara mendalam dan terbuka, dimana data yang diperoleh dari informan dalam bentuk informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. selain itu juga peneliti menentukan informan kunci yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu: 1) Kepala UPBJJ UT Ambon. Informasi/data yang

ingin dicapai adalah menyangkut seluruh indikator dalam ketiga variable penelitian ini. 2) Kepala sub Bagian Tata Usaha UPBJJ UT Ambon. Informasi/data yang ingin dicapai adalah menyangkut seluruh indikator dalam ketiga variable penelitian ini. 3) Bendahara Pembantu Pengeluaran UPBJJ UT Ambon. Informasi/data yang ingin dicapai adalah menyangkut seluruh indikator Rincian Biaya yang digunakan pada variable Sosialisasi dan Promosi dan 4) Pengelola Badan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP UT) Kabupaten Buru. Informasi/data yang ingin dicapai adalah menyangkut semua Indikator yang ada dalam Variable Sosialisasi dan Promosi dan Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa. b) Observasi langsung ke lokasi terutama di lokasi kelompok belajar Namlea Kabupaten Buru untuk melihat alat peraga sosialisasi dan promosi serta di kantor UPBJJ UT Ambon tempat dimana sehari-hari peneliti melaksanakan rutinitas kantor untuk melihat kegiatan, evaluasi kegiatan menyangkut dengan objek penelitian

Analisa yang dilakukan adalah analisis data Kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diberitakan kepada orang lain. (Bogdan dan Biken dalam Moleong:1997)

Dalam melakukan analisis data penelitian mengacu pada beberapa tahapan yang menurut Miles dan Huberman (dalam Moleong: 1997) terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 1) Pengumpulan informasi melalui wawancara, 2) Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. 3) Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif grafik, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 4) Pada tahap akhir adalah kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) yaitu mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang utuh. Model analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4: Model Analisis Data Kualitatif menurut Milles dan Humberman



Model Interaktif, analisa data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Informan Mahasiswa

Keadaan Informan dalam Penelitian ini terdiri dari mahasiswa Program Non Pendas yang berdomisili di Lokasi Ujian Namlea menurut Pekerjaan, Waktu Studi, Perkembangan Prestasi Akademik dalam Tiga Semester terakhir dan Jenis Kelamin. Uraian identitas Informan sebagaimana terlihat pada table-table berikut ini.

Tabel Pekerjaan			Tabel Waktu Kuliah			Tabel Jenis Kelamin		
No	Pekerjaan	Jumlah	No	Semester	Jumlah	No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	11	1	10 keatas	9	1	Laki-laki	5
2	TNI/Polri	1	2	7 - 9	5			
3	Wiraswasta	7	3	4 - 6	7	2	Perempuan	18
4	Lainnya	4	4	1 - 3	2			
Jumlah		23	Jumlah		23	Jumlah		23

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan.

Identitas Infoman Kunci

Identitas informan kunci adalah Kepala UPBJJ UT Ambon, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPBJJ UT Ambon, dan Badan Pengelola Pendidikan Lokasi Namlea. Indentitas Informan informan kunci meliputi jenis kelamin, Umur, tingkat Pendidikan. Keadaan Informan Informan Kunci sebagaimana diuraikan pada table-table dibawah ini.

Tabel Tingkat Pendidikan			Tabel Umur			Tabel Jenis Kelamin		
No	Pendidikan	Jumlah	No	Usia	Jumlah	No	Jenis Kelamin	
1	SMA	1	1	20 - 29	-	1	Laki-laki	3
2	S1	2	2	30 - 39	1			
3	S2	1	3	40 – 49	2	2	Perempuan	1

4	S3	-	4	50 - 65	1		
Jumlah		4	Jumlah		4	Jumlah	

Paparan Hasil Penelitian

Informan Mahasiswa

Data hasil penelitian dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara dengan mahasiswa sebagai subjek dari sosialisasi dan promosi. Hasil wawancara antara lain sebagai berikut:

Pertama. Sosialisasi dan promosi yang dilakukan UPBJJ UT Ambon pada periode 2013 adalah kurang efektif. Dimana pada periode tersebut sosialisasi yang dilakukan hanya melalui 1 (satu) buah spanduk.

Kedua. Informasi yang disampaikan melalui spanduk tersebut hanya sebatas waktu registrasi Pendas dan Non Pendas serta program studi yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka. Sementara informasi-informasi penting dan substansial menyangkut, mekanisme registrasi, tata cara melakukan penawaran mata kuliah, teknik belajar mandiri dan mekanisme ujian bagi mahasiswa baru tidak dijelaskan.

Ketiga. Menurut pendapat para mahasiswa, kuliah di Universitas Terbuka masih butuh banyak sosialisasi, karena kuliah di Universitas Terbuka tidak sama dengan Perguruan Tinggi lainnya, dimana para mahasiswa bisa bertemu langsung dengan para dosen dan pengelola pendidikan tersebut.

Keempat. Jarak antara mahasiswa yang berada didaerah-daerah sangat jauh dengan pengelola Universitas Terbuka seperti yang ada di Ambon (UPBJJ). (Hasil Wawancara, 18-20 september 2014)

Solusi yang dapat diambil guna memecahkan permasalahan di atas adalah dengan melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pemahaman kuliah di Universitas Terbuka. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain, pertama, perlunya sosialisasi kepada mahasiswa baru ketika melakukan registrasi pertama melalui Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) sebelum masa tutorial berjalan. Kedua, sosialisasi hendaknya dilakukan secara tatap muka sehingga hal-hal yang tidak dan belum difahami oleh mahasiswa bisa ditanyakan langsung saat sosialisasi berjalan. Ketiga adalah menggunakan waktu disela-sela ujian untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa. (Hasil wawancara dengan BPP Namlea, 20 september 2014)

Jawaban Informan mahasiswa dan pengelola Badan Penyelenggara Pendidikan Namlea adalah tanggapan responden dan informan kunci mengenai Sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh UPBJJ UT Ambon. Variabel Implementasi Kebijakan yang meliputi faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap, Struktur birokrasi dan Variabel Sosialisasi dan Promosi yang meliputi factor Manajemen dan penyelenggaraan, Efektifitas pelaksanaan, Prosedur pelaksanaan, Rincian biaya yang digunakan, Waktu pelaksanaan serta Variabel

Angka Partisipasi Mahasiswa yang meliputi factor Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar, Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang (Mata Kuliah).

Informan Kunci.

Informan Kunci adalah Kepala UPBJJ, Kepala sub bagian Tata Usaha, dan Pengelola Pendidikan UT di Namlea. Wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci sebagaimana tertera pada table berikut:

Tabel 10 : Tanggapan Informan Informan Kunci Terhadap Variabel Implementasi Kebijakan

No	Variable	Tanggapan Informan		
		Kepala UPBJJ	Kasubbag TU	Pengelola UT
A	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN			
1	Komunikasi	Masih lemahnya managerial di UPBJJ sehingga dalam melakukan sosialisasi dan promosi terlambat dalam membuat rencana, pelaksanaan dan control.	Komunikasi menyangkut sosprom selama ini masih terpusat di kasubbag TU, belum ada ide-ide yang efektif dalam pengelolaan terutama masukan dari staf. Paradigma ini harus dirubah. Dalam pelaksanaan sosprom, kita butuh dana awal, contohnya untuk melakukan sosprom ke SMA. Berikutnya sosprom berupa penyampaian misi UT ke instansi yang ingin lanjutkan pendidikan ke S2	Sebagai pengelola didaerah, selama ini ini kita hanya difungsikan sebagai tempat registrasi bagi mahasiswa, serta menyampaikan berbagai informasi menyangkut kegiatan akademik UT kepada mahasiswa
2	Sumber Daya	Sumber daya daya tercukupi untuk itu, namun kegiatan belum berjalan dengan baik, bahkan agenda sosialisasi ke SMA/SMK juga tidak jalan.	Untuk sosprom konvensional cukup memadai. Namun kedepan perlu ditingkatkan mengenai kemampuan memasarkan sehingga lebih memadai, bila ditingkatkan dengan sekarang dimana sosprom hanya sekedar ceramah. Sumber daya yang ada juga belum tepat sasaran dan harus didampingi.	Dalam konteks sumber daya yang dimiliki, saya rasa 1 staf untuk menangani sebanyak 50-an mahasiswa yang terdaftar masih mampu untuk mengelolanya.
3	Disposisi/Sikap	Saya tidak menutup mata dari budaya kerja yang belum ideal, untuk kita kembali lagi ke komunikasi dan perencanaan.	Seharusnya dibuat rencana dalam rapat persiapan sosprom dengan melibatkan semua staf, mengevaluasi sosprom sebelumnya dan menentukan mana yang efektif untuk dilaksanakan. Namun yang terjadi adalah mengulang sosprom sebelumnya (2012) dimana tanpa perencanaan, kurang tepat sasaran. Intinya semua belum dilaksanakan dengan baik.	Kami hanya menyampaikan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh UPBJJ kepada mahasiswa.

4	Struktur Birokrasi	Menyangkut struktur birokrasi, maka kita kembali kepada yang namanya tata kelola. Dalam hubungannya dengan sosialisasi dan Promosi maka kita mulai dari Tata Usaha. Dari Tata Usaha kita akan mulai dengan perencanaan yang baik sehingga hasil yang didapatkan juga sesuai harapan.	Dukungan staf masih kurang terutama dalam memberikan saran-saran, perencanaan karena selama ini masih terpusat pada kasubag TU. Struktur birokrasi cukup baik tapi perlu adanya rutinitas rapat untuk efektivitas dan dijalankan dengan baik.	Pengelola di daerah terutama yang ada di Pokjar Namlea, dulunya punya struktur birokrasi pengelolaan UT di Namlea, namun semuanya tidak aktif, dan saya hanya diminta bantuan untuk melaksanakan kegiatan registrasi.
---	--------------------	--	---	---

Tabel 11 : Tanggapan Informan Kunci Terhadap Variabel Sosialisasi dan Promosi

NO	Variable	Tanggapan Informan		
		Kepala UPBJJ	Kasubag TU	Pengelola UT
B	SOSIALISASI DAN PROMOSI			
1	Manajemen dan Penyelenggaraan	Pertama, sosprom yang kita lakukan adalah pengenalan menyangkut Universitas Terbuka. Kedua sebagian besar mahasiswa mengetahui tentang universitas Terbuka melalui cerita dari mulut ke mulut dan yang ketiga, mahasiswa UT tidak cukup hanya melalui sosprom itu, tapi butuh bimbingan dan pengawalan yang harus dipelihara.	Belum terlaksana dengan baik, kedepan harus dibuat tim sosprom yang diperkuat dengan SK. Tim ini diharapkan ikut memikirkan cara pelaksanaannya. Menyangkut penyelenggaraan masih kurang baik di manajemen sehingga pelaksanaannya juga kurang baik. Yang perlu digaris bawahi adalah perlu adanya evaluasi sosprom diawal tahun.	Cara melakukannya harus dirubah, kalau bisa harus dikoordinasikan dengan pengelola UT di daerah, jangan sampai kita hanya dijadikan sebagai tempat registrasi semata.
2	Efektivitas Pelaksanaan	Dalam membandingkan hasil yang dicapai, maka kita selalu mendapatkan mahasiswa baru. Dengan jumlah penduduk 1,6 juta dimana mahasiswa UT sekitar 3000 orang, maka itu tidak jelek. Tetapi saya harus jujur kalau mahasiswa yang ideal dan nilai bagus selama ini adalah mahasiswa yang alih kredit dan SDMnya bagus.	Yang jalan pada periode 2013 cukup efektif walaupun hanya lewat RRI dan Spanduk. Dengan spanduk itu maka mengukuhkan pengelola UT di daerah sehingga mereka lebih mudah melakukan sosialisasi di daerah. Untuk Radio berpengaruh positif sehingga mahasiswa lama merasa diperhatikan, dan mereka bisa sosialisasikan UT di daerah.	Buat saya sosprom yang telah dilakukan tidak efektif karena mahasiswa ini berada pada tempat yang berbeda dan berjauhan, apalagi hanya dengan 1 buah spanduk
3	Prosedur Pelaksanaan	Sosialisasi dan promosi yang berjalan selama ini belum ideal karena belum dijalankan dengan baik. Kita masih terkendala masalah manajerial	Untuk spanduk telah dipasang disemua kabupaten/kota, radio disiarkan melalui melalui frekwensi tersendiri sehingga mahasiswa	Masalah prosedur mungkin itu bukan kewenangan kami sebagai pengelola, namun semuanya ditentukan di

		sehingga hanya sekedar berjalan, tapi menurut saya manajemennya harus ditingkatkan.	didaerah yang jauh bisa mengikuti perkembangan. Namun banyak juga kendala sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan untuk melaksanakan hal ini agar bisa direalisasikan sesuai yang dianggarkan. Misalnya tentang transport pelaksanaan sosprom di radio yang belum dibayarkan.	UPBJJ, kami hanya melaksanakan.
4	Rincian Biaya Yang Digunakan	Saya tidak jamin kalau realisasi dan rancangan biaya sebagaimana telah disebutkan diatas.	Tidak jelas. Yang saya tahu untuk spanduk Rp 10.000.000 yang terdiri dari biaya cetak, biaya kirim, biaya pemasangan dan biaya perijinan. Namun kenyataannya tidak sesuai. Untuk radio telah berjalan sesuai yang direncanakan, namun pertanggungjawaban tidak sesuai. Dari total anggaran yang direncanakan, sisa anggaran yang tidak dipakai akan dikembalikan. (tidak dicairkan)	Menyangkut rincian biaya kami tidak tahu, kami hanya menerima spanduk, lalu selanjutnya kami harus mengurus ijin dan melakukan pemasangan dengan biaya sendiri.
5	Waktu Pelaksanaan	Sosialisasi dan promosi bisa berjalan kapan saja. Namun idealnya sebelum registrasi sudah harus direncanakan. Untuk itu harus dimulai dengan membuat tim, siapa melakukan apa dan anggarannya sudah harus siap sebelum kegiatan berjalan.	Kurang tepat. terlalu dekat dengan waktu penutupan registrasi. Sementara untuk sosprom lewat radio perlu diperhatikan untuk dilaksanakan (disiarkan) pada jam istirahat atau hari libur.	Kalau bisa sosialisasi dilaksanakan saat waktu registrasi mata kuliah dilaksanakan, sehingga pada saat itu juga mahasiswa bisa melakukan registrasi.

NO	Variabel	Tanggapan Informan		
		Kepala UPBJJ	Kasubbag TU	Pengelola UT
C	ANGKA PARTISIPASI MAHASISWA			
1	Jumlah Mahasiswa Baru yang Mendaftar	Naik turunnya mahasiswa tergantung bagaimana kita memeliharanya. Yang lebih mendasar itu adalah memelihara mahasiswa yang telah ada.	Memang terjadi penurunan, dan kita akan koornasikan lagi	Terdapat kenaikan jumlah mahasiswa baru
2	Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang	Walaupun terjadi penurunan angka registrasi mata kuliah namun kita harus tetap berusaha untuk mengingatkannya, mengingat daya jangkau sangat terbatas.	Ini juga terjadi penurunan, dan kedepan sosprom harus dikelola dengan baik.	Harus kami akui kalau terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang melakukan regisstrasi ulang karena keterlambatan informasi yang mereka peroleh.

Analisis Data

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards, implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Menurut George C. Edwards III, Ada empat variable utama dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. sehingga hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Peningkatan ini bisa saja dimulai dari penyederhanaan pengertian dengan cara mem*breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Komponen-komponen tersebut antara lain:

Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Dalam penelitian ini terlihat bahwa, komunikasi sebagaimana yang diharapkan belum terlaksana dengan baik sehingga hal ini berpengaruh kepada perencanaan kegiatan sosialisasi dan promosi. Bahkan yang selama ini terjadi di UPBJJ UT Ambon adalah Komunikasi menyangkut sosprom selama ini masih terpusat di kasubbag TU, belum ada ide-ide yang efektif dalam pengelolaan terutama masukan dari staf. .

Selanjutnya untuk mancapat tujuan dari implelementasi kebijakan terutama dalam komunikasi maka konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementator mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang

dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Staf pelaksanaan sosialisasi dan promosi yang terdiri dari 6 staf akademik dengan kualifikasi pendidikan S2 (magister) 6 staf administrasi dengan kualifikasi pendidikan s1 sebanyak 4 orang dan SMA/ sederajat 2 orang dirasa cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi. Namun kendala komunikasi dan perencanaan berakibat sosialisasi dan promosi periode 2013 tidak efektif.

Karena Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Seharusnya dibuat rencana dalam rapat persiapan sosialisasi dan promosi dengan melibatkan semua staf, mengevaluasi sosprom sebelumnya dan menentukan mana yang efektif untuk dilaksanakan. Namun yang terjadi adalah mengulang sosialisasi dan promosi sebelumnya (2012) dimana tanpa perencanaan, kurang tepat sasaran.

Kondisi inilah yang terjadi di UPBJJ UT Ambon dimana implementator kebijakan sosialisasi dan promosi masih berjalan sendiri tanpa melibat staf lainnya terutama dalam perencanaan. Bahkan budaya kerja di di UPBJJ UT Ambon belum ideal sebagaimana yang diharapkan. sehingga kedepan budaya kerja ini harus dirubah serta ditingkatkan efektifitas pelaksanaannya.

Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Pemahaman tersebut diatas haruslah menjadi pijakan dalam melakukan rencana-rencana kegiatan. penelitian ini tentunya ingin memberikan gambaran mengenai kondisi riil pada objek penelitian. Menyangkut struktur birokrasi, maka tidak terlepas dari tata kelola. Dalam hubungannya dengan sosialisasi dan Promosi maka kita mulai dari Tata Usaha. Dari Tata Usaha kita akan mulai

dengan perencanaan yang baik sehingga hasil yang didapatkan juga sesuai harapan.

untuk mencapai harapan tersebut, tentunya dukungan staf harus optimal. namun yang terjadi di lokasi penelitian masih kurang terutama dalam memberikan saran-saran, perencanaan karena selama ini masih terpusat pada kasubag TU. Struktur birokrasi cukup baik tapi perlu adanya komunikasi yang rutin untuk efektivitas dan dijalankan dengan baik.

C. PENUTUP

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV UT Tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis Implementasi Kebijakan tersebut dilihat dari Variabel Implementasi Kebijakan yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, Struktur birokrasi. Variabel Sosialisasi dan Promosi yang meliputi Manajemen dan penyelenggaraan, Efektifitas pelaksanaan, Prosedur pelaksanaan, Rincian biaya yang digunakan, Waktu pelaksanaan, dan Variabel Angka Partisipasi Mahasiswa yang meliputi Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi ulang (Mata Kuliah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelementasi kebijakan Kantor Pembantu Rektor IV tentang Pemberian Tambahan Dana Sosialisasi dan Promosi dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Mahasiswa di UPBJJ UT Ambon tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari:

- a. belum adanya perencanaan yang matang menyangkut kegiatan sosialisasi dan promosi yang akan dilakukan.
- b. perencanaan sosialisasi dan promosi masih berpusat pada' salah satu bidang (Kasubbag) sehingga bagian lain merasa tidak punya tanggungjawab dalam merencanakan kegiatan sosialisasi dan promosi.
- c. belum transparannya informasi ketersediaan dan penggunaan dana sosialisasi dan promosi yang diterima UPBJJ UT Ambon dari kantor Pembantu Rektor IV.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi mahasiswa, maka kegiatan sosialisasi dan promosi harus direncanakan secara matang.

2. Perlu adanya pelibatan semua staf dalam perencanaan kegiatan sosialisasi dan promosi sehingga target ketercapaian angka partisipasi mahasiswa dapat tercapai.
3. Hal yang sangat penting adalah adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sosialisasi dan promosi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Solihin, (2002) *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bogdan, Robert dan Biklen, Sari Knop. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. Boston.
- Edwards III, George, (1980) *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Pres*, Washington DC.
- Grindle, M, (1980) , *Politic and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Pess, Princeton.
- Mazmanian, Daniel A. Andpaul A. Gunn, *Policy : Case Studies and Political Theory, World Politics*, 16, No 4 (Juli 1964).
- Winarno , (2002) , Analisis Kebijakan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wikipedia, 2001, *Pemerintahan Daerah*, <http://www.wikipwdia.org>, 8 Juli.